



**MUSEUM PERUMUSAN  
NASKAH PROKLAMASI**

Jl. Imam Bonjol No 1 Jakarta Pusat  
Telp : (021) 3144743 Fax : (021) 3924259

[www.munasprok.or.id](http://www.munasprok.or.id)

✉ [munasprok@kemdikbud.go.id](mailto:munasprok@kemdikbud.go.id)

🐦 [@MuseumNasProk](https://twitter.com/MuseumNasProk)

📘 Perumusan Naskah Proklamasi

📺 [munasprok](https://www.youtube.com/channel/UCmUNasProk)



# SEJARAH

**MUSEUM** PERUMUSAN  
NASKAH **PROKLAMASI**

Dicetak ulang :  
Museum Perumusan Naskah Proklamasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
2019

## DAFTAR ISI

|                                                                                     | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SAMBUTAN KEPALA MUSEUM.....                                                         | i       |
| DAFTAR ISI .....                                                                    | iii     |
| BAB I : PENDAHULUAN .....                                                           | 1       |
| BAB II : SELINTAS SEJARAH MENUJU PROKLAMASI                                         |         |
| KEMERDEKAAN .....                                                                   | 7       |
| A. Pola Politik Jepang Terhadap Indonesia .....                                     | 7       |
| B. Janji Kemerdekaan Indonesia di Kemudian Hari .....                               | 26      |
| C. Peranan Golongan Pemuda Dalam Proklamasi<br>Kemerdekaan Republik Indonesia ..... | 36      |
| BAB III : SEKITAR PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI .....                                 | 41      |
| A. Peristiwa Menjelang Proklamasi .....                                             | 41      |
| B. Proses Perumusan Naskah Proklamasi .....                                         | 49      |
| C. Hubungan Museum Perumusan Naskah Proklamasi<br>dengan Museum Lain .....          | 61      |
| BAB IV : MENINJAU MUSEUM PERUMUSAN NASKAH<br>PROKLAMASI DARI DEKAT .....            | 65      |
| A. Sejarah Bangunan .....                                                           | 65      |
| B. Keadaan Bangunan .....                                                           | 67      |
| C. Ruangan Bersejarah .....                                                         | 69      |
| 1. Ruang Penerimaan .....                                                           | 70      |
| 2. Ruang Perumusan Naskah Proklamasi .....                                          | 71      |
| 3. Ruang Pengetikan .....                                                           | 72      |
| 4. Ruang Pengesahan Naskah Proklamasi .....                                         | 73      |
| BAB V : PENUTUP .....                                                               | 75      |
| DAFTAR SUMBER .....                                                                 | 77      |

## BAB I PENDAHULUAN

Pada dasarnya sejarah adalah rangkaian perjuangan umat manusia dalam rangka perjuangan mempertahankan eksistensinya dan untuk mencapai cita-citanya. Demikian pula halnya dengan perjuangan bangsa Indonesia. Sejak “Bangsa Indonesia” mulai ada, sejak itu pula perjuangan bangsa telah ada. Hal ini berarti pada waktu berdirinya kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram, Aceh, Makasar, dan sebagainya, perjuangan “Bangsa Indonesia” telah berlangsung. Sejak munculnya Bangsa Barat di Indonesia, terutama sejak berhasilnya kolonialisme Belanda menanamkan kekuasaannya, perjuangan bangsa Indonesia terutama ditujukan untuk mengusir kaum penjajah.

Penjajahan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Selain itu timbul pula perubahan sosial yang akhirnya menciptakan kondisi-kondisi yang penuh kecenderungan bagi rakyat untuk mengadakan perlawanan.

Seorang ahli sejarah Inggris Arnold Toynbee mengemukakan hasil penelitiannya, bahwa apabila dua peradaban bertemu dan penemuan itu ternyata mengakibatkan adanya penjajah dan yang dijajah, maka biasanya hal itu akan menimbulkan suatu reaksi atau perlawanan. Cara mereka melakukan perlawanan terhadap penjajah itu ada dua macam.

Pertama, dengan sikap seolah-olah negatif dan pasif. Mereka menjauhi penjajah, menolak pengaruhnya dan selalu menghindarkan perkenalan dengan kebudayaan, tehnik, organisasi dan lain-lain yang dibawa oleh penjajah. Mereka seolah-olah mengasingkan diri dan menutup pintu rapat-rapat bagi pengaruh penjajah. Dalam keadaan isolasi itu mereka memohon kepada Tuhan agar diberi kekuatan serta dapat dibebaskan dari cengkeraman penindasan penjajah. Sikap atau aliran ini biasa dinamakan *Zelotisme*.

Kedua, sikap yang dinamakan *Herodianisme*, yaitu dengan membuka pintu lebar-lebar bagi pengaruh penjajah. Mereka meniru dan mempelajari mengenai segala yang dibawa penjajah, baik yang berhubungan dengan bidang ekonomi, politik, kebudayaan, organisasi maupun yang berhubungan dengan bidang persenjataan. Setelah mereka berhasil memperoleh berbagai pelajaran dari pihak penjajah itu, maka dengan pengetahuan yang telah diperoleh itu mereka berusaha melawan dan mengusir penjajah.

Perkembangan sejarah perjuangan bangsa Indonesia mengalami perkembangan semacam itu. Akan tetapi, terwujud dalam berbagai bentuk:

Pertama, perlawanan yang biasa disebut istilah protes sosial. Perlawanan semacam ini umumnya berlangsung tidak lama dan merupakan pergerakan lokal yang tidak ada koordinasi antara yang satu dengan yang lainnya. Organisasi, program serta taktiknya masih sangat sederhana. Dalam peristilahan kolonial, peristiwa-peristiwa itu digolongkan sebagai gangguan ketentraman, huru-hara, kerusuhan, atau gerakan rohani. Contoh terkenal dalam hal ini adalah pemberontakan Cilegon-Banten pada tahun 1888 dibawah pimpinan Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail; pemberontakan Cimareme-Garut tahun 1919 di bawah pimpinan Haji Hasan (*Sartono Kartodirdjo, 1967:15*).

Kedua, perlawanan bersenjata yang sifatnya lebih besar dan berlangsung lama bahkan bertahun-tahun, seperti Perang Paderi, Perang Diponegoro, Perang Aceh dan sebagainya.

Perlawanan menentang penjajah bentuk ketiga adalah perlawanan dengan cara modern yaitu dengan mengadakan organisasi yang teratur atau biasa disebut pergerakan nasional. Perbedaan dengan perlawanan terdahulu ialah pergerakan nasional tidak dilakukan dengan bentuk mengangkat senjata melainkan dengan bentuk organisasi.

Sejarah pergerakan kemerdekaan Bangsa Indonesia merupakan suatu sejarah yang berkesinambungan. Maka kesinambungan sejarah

itu harus diterima sebagai masalah dan sekaligus sebagai tanggung jawab secara sadar.

Dalam masa Kebangkitan Nasional, bangsa Indonesia menyadari perlunya persatuan untuk perjuangan mencapai Indonesia merdeka. Atas dasar persatuan dan keinginan itulah pada tanggal 28 Oktober 1928 dicetuskan Sumpah Pemuda yang merupakan unjuk rasa bangsa Indonesia dalam rangka perjuangan mencapai Indonesia merdeka. Kelanjutan dari perjuangan bangsa Indonesia mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang telah membawa bangsa Indonesia merdeka, berdaulat serta menuju tahapan baru untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan yang telah diproklamasikan.

Peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi terjadi di gedung bekas kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda yang pada waktu itu bernama jalan Meiji Dori No.1 Jakarta dan kini menjadi Jalan Imam Bonjol No.1. Peristiwa ini merupakan salah satu rangkaian sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena peristiwa itu tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi.

Oleh karena peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi itu terjadi pada masa pendudukan Jepang, maka seyogyanya kita pun menghayati atau meneliti bagaimana suasana politik di zaman itu. Nasionalisme Indonesia sebagai alat propaganda dengan dukungan pihak Jepang, menderita pasang surut yang parah sampai adanya janji Jepang pada bulan September 1944, yaitu janji memberikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari.

Di masa pendudukan Jepang, perjuangan rakyat untuk mencapai kemerdekaan berlangsung secara legal dan ilegal. Perekonomian perang yang dilaksanakan Jepang di Indonesia telah menyebabkan desa dan para petaninya juga bergolak. Di Indramayu dan Singaparna timbul pemberontakan, juga di kalangan PETA terjadi pemberontakan, seperti yang terjadi di Blitar.

Di lain pihak, pendudukan Jepang di Indonesia dapat dikatakan telah memperkuat pergerakan nasional, karena :

- (1) Keruntuhan Sekutu, secara psikologis telah menghancurkan mitos bahwa bangsa kulit putih lebih unggul dari kulit berwarna.
- (2) Terbukanya beberapa jabatan tinggi yang biasanya diduduki oleh Bangsa Belanda, secara psikologis telah membuka dan menumbuhkan harapan dan pengalaman kepada Bangsa Indonesia.
- (3) Terbukanya kesempatan bagi golongan muda untuk ikut serta dalam organisasi militer dan semi militer, merupakan bantuan kekuatan nyata bagi pergerakan. Para pemimpin pergerakan sadar akan nilai kekuatan organisasi-organisasi itu dan berusaha agar jangan sampai menjadi alat Jepang semata.
- (4) Politik Jepang sejak kedatangannya telah mempertimbangkan akan bantuan golongan nasionalis yang telah dikecewakan Belanda. Tujuan Jepang semula ialah agar mereka dapat dijadikan alat untuk memobilisasi rakyat demi kepentingan program perangnya. Namun kaum nasionalis telah memanfaatkan kebebasan legal yang dimiliki oleh organisasi yang dibentuk Jepang untuk menyusun kekuatan nasional. Selain itu, kedudukan organisasi yang berorientasi agama Islam tumbuh menjadi kuat.

Tatkala janji memberikan kemerdekaan Indonesia lebih dinyatakan, di samping pengumuman akan didirikannya "Dokuritsu Zyumbi Tyosakai" atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), maka sejak itu golongan nasionalis mengambil inisiatif dengan mencari, membicarakan, serta merumuskan Piagam Jakarta dan Naskah Pembukaan Undang-undang Dasar. Akhirnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang semula adalah badan yang dibentuk Jepang, akan tetapi sejak Jepang jatuh, badan itu sifatnya berubah menjadi badan nasional karena tidak pernah dilantik Jepang dan anggotanyapun

ditambah 6 orang. Sampai akhirnya, terjadi perbedaan pendapat antara golongan pemuda Revolusioner dengan generasi tua nasionalis di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta, sehingga terjadi peristiwa Rengasdengklok. Akhirnya terjadilah peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi, yang merupakan sejarah awal berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia, yang dilanjutkan dengan pembacaan naskah Proklamasi bangsa Indonesia oleh Ir. Soekarno dengan didampingi Drs. Moh. Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi merupakan mata rantai yang menyambungkan masa lampau dengan harapan-harapan masa datang. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia merupakan salah satu cara dalam usaha pembinaan antar generasi Indonesia.

Sejarah pergerakan nasional maupun sejarah kemerdekaan merupakan nilai luhur yang lahir dari kancah perjuangan bangsa. Generasi muda yang akan meneruskan perjalanan sejarah bangsa Indonesia adalah generasi muda yang tidak lagi mengalami pahit getirnya zaman penjajahan Belanda tidak mengalami penderitaan zaman pendudukan Jepang, tidak mengalami perang kemerdekaan yang digetarkan oleh semboyan "Merdeka atau mati", tidak pula mengalami pergumulan politik internal yang tidak kunjung selesai, sampai akhirnya lahir Orde Baru. Generasi muda yang meneruskan sejarah itu adalah generasi muda yang ketika datang di dunia ini hanya mengetahui Indonesia sudah merdeka, berdaulat dan sedang membangun. Perjuangan dan pengorbanan masa silam, memang terjadi di masa lampau.

Sejalan dengan tujuan untuk mempelajari dan menghayati proses sejarah tersebut, maka peristiwa tersebut perlu diabadikan dalam sebuah museum. Sebagaimana kita ketahui bahwa museum dapat berperan sebagai sarana komunikasi antara generasi, sehingga kita bukan hanya mengetahui jalannya sejarah saja, tetapi juga

memahami pengertian yang hakiki serta dapat mengambil manfaat dari padanya.

Salah satu museum sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia, adalah Museum Perumusan Naskah Proklamasi karena merupakan tempat terjadinya peristiwa sejarah awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa bersejarah itu berlangsung dalam suasana yang mengandung unsur kerahasiaan maupun urgensi yang amat mendesak, sehingga perekaman peristiwa dengan gambar tidak terjadi. Dengan demikian, hasil pengumpulan data sejarah untuk divisualkan dalam bentuk museum masih belum memuaskan. Akan tetapi Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini berusaha mewujudkan seperti waktu peristiwa terjadi dan memberikan informasi bahwa di gedung jalan Imam Bonjol No.1 pernah terjadi peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia.

Gedung Jalan Imam Bonjol No.1 pernah berperan pula dalam periode bangsa Indonesia mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan.

## BAB II

### SELINTAS SEJARAH MENUJU PROKLAMASI KEMERDEKAAN

#### A. Pola Politik Jepang Terhadap Indonesia

Setelah tanggal 8 Desember 1941 Jepang menyerang Pearl Harbour, Pangkalan Amerika Serikat terbesar di Asia Pasifik, Jepang mulai bergerak ke Indonesia yang diharapkan dapat memberikan posisi yang strategis dan sumber kekuatan untuk dapat melanjutkan peperangan. Panglima Angkatan Bersenjata Belanda, atas nama angkatan Perang Serikat di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Jepang tanggal 8 Maret 1942. Begitu pula dengan Gubernur Jenderal Belanda terakhir di Indonesia, Tjarda Van Strakerbourgh Stochouwer, menerima nasib sebagai tawanan.

Usaha Jepang dalam menarik simpati bangsa Indonesia, terutama rakyat Jawa, dilakukan dengan cara menghubungkan dengan kehidupan keraton di Pulau Jawa. Pada waktu itu, Ramalan Jayabaya sangat mempengaruhi jiwa dan jalan pikiran rakyat di Pulau Jawa. Oleh karena itu, Jepang memanfaatkannya untuk menarik perhatian rakyat Pulau Jawa terhadap kemenangan-kemenangan Jepang di daerah Pasifik.

Di kalangan penduduk Pulau Jawa, Ramalan Jayabaya mulai tersiar lagi dari mulut ke mulut. Ramalan itu menyatakan "bahwa sebelum zaman aman dan makmur tiba, perang Pasifik akan pecah. Di dalam perang itu bangsa kulit kuning dari utara akan datang mengusir penjajah, mereka tinggal hanya seumur jagung sesudah itu Indonesia akan merdeka" (CL. Geertz, 1964: 116).

Oleh karena itu Indonesia percaya, kedatangan tentara Jepang disambut dengan gembira. Rakyat Indonesia percaya bahwa kedatangan tentara Jepang itu benar-benar hendak membebaskan Indonesia dari cengkeraman penjajah Belanda, sesuai dengan surat-surat selebaran

yang mereka sebarkan sebelum mendarat di Pulau Jawa. Di antara surat selebaran itu ada yang ditujukan kepada Susuhunan Surakarta dan Sultan Yogyakarta, yang kira-kira berbunyi sebagai berikut

“Raja-raja di Jawa, perintahlah Serdadu Tuan meninggalkan barisan Belanda, dan kita datang tidak untuk memerangi Tuan dan serdadu Tuan. Leluhur Tuan, Raja Joyoboyo di Kediri, pernah berkata bahwa bangsa kulit kuning akan datang menolong tuan dan bangsa Tuan; dan sekaranglah kami datang untuk menolong”. (A. G. Pringgodigdo, 1977:87).

Di seluruh pulau Jawa, kedatangan tentara Jepang itu disambut dengan pengibaran Sang Merah Putih di samping bendera Jepang Hinomaru dan dengan nyanyian lagu Indonesia Raya. Banyak orang mengira tidak lama lagi Indonesia akan merdeka “seumur jagung”, yang berarti kurang lebih 100 hari dinanti-nanti dengan penuh berdebar-debar. Di Jakarta misalnya, telah direncanakan suatu susunan badan pemerintah Indonesia yang terdiri dari: Abikusno Tjokrosoejoso sebagai Perdana Menteri, Ir. Soekarno yang saat itu masih dalam tahanan di Sumatera, sebagai Wakil Perdana Menteri dan beberapa pimpinan nasional lainnya sebagai Menteri.

Tetapi tindakan ini ternyata tidak mendapat persetujuan dari pihak Jepang. Pada tanggal 20 Maret 1942, diumumkan Undang-undang No.3 yang melarang dilakukannya perbincangan pergerakan atau propaganda mengenai peraturan dan susunan negara. Undang-undang tersebut disusul dengan Undang-undang No.4 yang menyatakan bahwa hanya bendera Jepang yang boleh dikibarkan. Hal itu berarti bahwa pengibaran Sang Merah Putih dilarang. Di samping itu lagu Indonesia Raya pun tidak boleh dinyanyikan, sehingga dengan demikian hanya lagu Kimigayo-lah yang boleh diperdengarkan.

Larangan kedua hal tersebut, sangatlah menggelisahkan bangsa Indonesia, sadarlah mereka bahwa penjajah Belanda kini berganti dengan penjajah Jepang. Bendera Merah Putih Biru diganti dengan

Bendera Matahari Terbit, lagu *Wilhelmus* dengan lagu *Kimigayo* dan “Lang Lene de Koning in” menjadi “Tenno Heika Banzai”.

Di dalam usaha “Men-Jepangkan Indonesia” dikeluarkan ketentuan yang menyatakan bahwa pada hari-hari besar hanya bendera Jepang yang boleh dikibarkan, sedang lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah lagu Kimigayo. Mulai 1 April 1942, waktu yang dipakai adalah waktu Jepang atau waktu Tokyo. Perbedaan antara waktu Jepang dengan waktu Jawa ialah 90 menit. Mulai tanggal 29 April 1942 tarikh yang berlaku ialah Tarikh *Sumera* dan tahunnya adalah tahun 2602. Di samping itu, setiap tahun rakyat Indonesia diharuskan merayakan hari raya *Tenchosetsu*, yaitu hari lahir Kaisar Hirohito atau Tenno Heika.

Pada masa pendudukan Jepang, Indonesia diperintah oleh Pemerintahan Militer yang membagi wilayah menjadi tiga daerah pemerintahan, yaitu :

1. Pemerintahan Militer Angkatan Darat (*Rikugun*), dipegang oleh tentara kedua puluh lima, meliputi wilayah Sumatera dengan kedudukan di Bukit Tinggi.
2. Pemerintahan Militer Angkatan Darat yang dipegang oleh tentara keenam belas, meliputi Jawa dan Madura dengan berkedudukan di Batavia (waktu itu namanya belum Jakarta)
3. Pemerintahan Militer Angkatan Laut (*Kaigun*), dipegang oleh Armada Selatan kedua, meliputi wilayah Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat (waktu itu belum Irian Jaya) dengan berkedudukan di Makasar (*MA. Azis, 1955:160-161*).

Peraturan Tata Negara yang dipakai pada waktu itu ialah Undang-undang No.1 tahun 1942. Berdasarkan undang-undang itu, Jabatan Gubernur Jenderal dihapuskan dan sebagai gantinya pimpinan dipegang oleh *Gunshireikan* (Panglima Tentara) yang kemudian disebut *Saiko Syikikan*.

Dalam pemerintah Militer Angkatan Darat, dibentuk pemerintah *Gunsei*. Sedangkan pada pemerintah Angkatan Laut, dibentuk pemerintah *Minseifu* yang berpusat di Makasar. *Minseifu* terdiri atas tiga bagian yang masing-masing berpusat di Kalimantan, Sulawesi, dan P. Seram. Sedangkan daerahnya meliputi "*Syu, Ken, bunken* (sub kabupaten), *gun* dan *Son*."

Untuk memudahkan hubungan pemerintah Angkatan Laut dan pemerintah Angkatan Darat di Jawa, dalam rangka menjamin kebutuhan-kebutuhan Angkatan Laut, maka dibuka kantor penghubung Angkatan Laut (*Bukanfu*) di Jakarta, yang dipimpin oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda.

Mengenai peraturan keuangan, diatur oleh Undang-undang No.2 tanggal 8 Maret 1942. Dalam undang-undang tersebut, ditetapkan bahwa untuk kepentingan jual-beli dan pembayaran lainnya adalah mata uang Rupiah Hindia Belanda, sedangkan pemakaian mata uang lain dilarang keras (*A. G. Pringgogidgo 1952 :14-15*).

Perubahan peraturan yang dilakukan pemerintah Militer Jepang terhadap peraturan pemerintah Hindia Belanda yang masih dipakai di Indonesia, diikuti dengan diadakannya pemecatan kepada para pegawai bangsa Belanda, serta membentuk pemerintahan setempat.

Akan tetapi, usaha yang dilakukan pemerintah Militer Jepang itu tidak dapat berjalan lancar, karena Jepang mengalami kekurangan pegawai. Keadaan tersebut disebabkan oleh karena kapal yang mengangkut pegawai dari Jepang yang direncanakan menggantikan pegawai Belanda yang telah dipecat itu, di tengah perjalanan terkena torpedo Sekutu (*MA. Azis, 1955: 158*).

Sehubungan dengan kejadian itu, maka untuk mengisi kekosongan pegawai diangkat pegawai-pegawai bangsa Indonesia. Namun demikian, pegawai bangsa Indonesia hanya menjabat sebagai wakil atau pendamping saja. Di Jawa Barat, Gubernur Kolonel Matsui didampingi oleh R. Pandu Suradiningrat sebagai Wakil Gubernur, di Jawa Tengah,

Gubernur Letnan Kolonel Taga didampingi oleh Muhamad Chalil sebagai Wakil Gubernur, H. Dahlan Abdullah diangkat sebagai Kepala pemerintahan kota Batavia. Akan tetapi pemerintahan itu hanya bersifat sementara, sampai akhirnya dikeluarkan peraturan baru.

Pada bulan Agustus 1942, Pemerintah Militer Jepang mengeluarkan Undang-undang No.27, tentang aturan Pemerintah *Syu* dan *Tokubetsu Syi*. Isi undang-undang itu antara lain, disebutkan bahwa pulau Jawa dan Madura kecuali *koci* (Daerah Istimewa) Surakarta dan Yogyakarta, dibagi atas *Syu* (Keresidenan), *Syi* (Kotamadya), *Ken* (Kabupaten), *Gun* (Kewedanaan), *Son* (Kecamatan) dan *Ku* (Desa). Dengan demikian pemerintahan sementara telah berakhir (*A. G. Pringgogidgo, 1952: 22-23*).

Adanya peraturan tersebut, telah mengubah status provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi pemerintahan *Syu*. Jumlah *Syu* di Pulau Jawa ada 17 buah, yaitu Banten, Batavia, Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, Kudus, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki dan Madura.

Pemerintah *Syu* dipimpin oleh seorang *Syukokan* dan kekuatannya sama dengan Gubernur, sedangkan daerah kekuasaannya sama dengan Keresidenan. Untuk Batavia, ditetapkan sebagai *Tokubetsu Syi* (kota praja Istimewa) sedangkan Sumatera dibagi menjadi 10 *Syu* yaitu: Aceh, Sumatera Timur, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung, dan Bangka-Belitung. Setiap *syu* terdiri atas, *bunsyu* (sub-keresidenan), *gun* dan *son*. Untuk jabatan tinggi dalam pegawai pemerintahan ini, dipegang oleh orang Jepang. Sedangkan jabatan yang disediakan untuk bangsa Indonesia, hanya meliputi *Gunco* dan *Sonco* (*G.S. Kanahele, 1967: 35*).

Dalam usaha mempersatukan semua orang Asia yang pro Jepang, dibentuk Gerakan Tiga A yang mengumandangkan semboyan "Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia". Gerakan tersebut dimaksudkan oleh Jepang untuk merangkul semua orang Asia dan menggantikan semua organisasi politik, kultural

dan agama yang ada di Jawa. Akan tetapi kini terjadi dua macam tujuan yang berlawanan, di satu pihak yaitu tujuan Jepang yang ingin memobilisasi seluruh rakyat Asia Timur untuk kepentingan perangnya dan mewujudkan daerah kemakmuran bersama Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang. Di lain pihak, terdapat tujuan bangsa Indonesia yang ingin mengusir penjajah. Kekecewaan pada kedua pihak itu nantinya akan bangkit dan memupuk saling kecurigaan.

Pemimpin Gerakan Tiga A ialah Mr. Samsudin, yang dipandang oleh Mr. Ahmad Soebardjo, sebagai seorang tokoh nasional yang dikenal lunak. Untuk menyebarluaskan slogan Gerakan Tiga A itu, diikutsertakan pula seorang propagandis Jepang, Hitoshi Shimizu, dengan pidato-pidatonya dalam bahasa Indonesia yang fasih. Selain itu penyebaran slogan dilakukan Jepang dengan penerbitan harian, yaitu harian "Asia Raya".

Ternyata Gerakan Tiga A hanya berusia beberapa bulan saja, H.J. Benda menilai bahwa Gerakan Tiga A itu dibentuk oleh pejabat-pejabat sipil dalam badan propaganda tanpa didukung oleh pejabat-pejabat militer yang memandang gerakan itu dengan curiga. Akhirnya Gerakan Tiga A menemui akhir yang merana dan mati karena solidaritas Asia menentang Barat di bawah hegemoni Jepang merupakan suatu hal yang bagaimanapun akan memancing sambutan lunak dari orang-orang Indonesia.

Menurut George S. Kanahela, sebab dibubarkannya Gerakan Tiga A, karena adanya perpecahan diantara penguasa Jepang. Staf *Gunseikan* menuduh Gerakan Tiga A telah menjadi suatu organisasi massa, padahal seharusnya merupakan gerakan propaganda. Sedangkan ketentuannya, organisasi massa harus berada di bawah pengawasan "*Gunseikanbu*". Oleh karena itu, sarjana-sarjana Jepang sendiri mengatakan bahwa Gerakan Tiga A adalah suatu drama komedi yang ditulis dan dipentaskan oleh Hitoshi Shimizu dan dimainkan oleh orang Indonesia. (*G.S. Kanahel, 1967: 43-49*).

Terlepas dari pendapat tersebut, Jepang mulai sadar bahwa Gerakan Kebangsaan Indonesia merupakan suatu gerakan yang nyata dan kuat. Kesadaran ini, menyebabkan mereka merubah garis politiknya. Mereka lalu berpaling kepada pemimpin-pemimpin nasionalis yang mereka anggap benar-benar memiliki dukungan nyata dari rakyat. Dengan latar belakang politik ini, Jepang memutuskan untuk menampilkan tokoh-tokoh nasionalis Soekarno dan Hatta yang merupakan tokoh-tokoh nasionalis terkenal. Maka, kedua tokoh ini dibebaskan dari tahanan politik pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu, Soekarno berada di pengasingan di Sumatera sedangkan Hatta di Sukabumi.

Dalam pertemuan antara Soekarno dan Hatta, keduanya mengambil keputusan untuk menyampingkan perselisihan pahamnya dari zaman Partindo dan PNI Baru, untuk kemudian bersatu memimpin rakyat Indonesia. Persatuan antara keduanya kemudian dikenal dengan sebutan "Dwi Tunggal".

Kesediaan Soekarno dan Hatta untuk bekerja sama dengan Jepang itu, karena adanya jaminan kemerdekaan Indonesia. Kerja sama Dwi Tunggal dengan pihak Jepang ini dimulai dalam suatu komisi penyelidikan adat istiadat dan tata negara yang dibentuk oleh *Gunseikan* pada tanggal 8 Nopember 1942.

Kelanjutan dari kerjasama tersebut, pada tanggal 9 Maret 1943, dibentuk POETERA (Poesat Tenaga Rakyat) di bawah pimpinan "Empat Serangkai" yang terdiri dari Ir. Soekarno, Hatta, K.H. Mas Mansoer dan Ki Hajar Dewantara. Berdirinya gerakan tersebut dimungkinkan pembentukannya atas usul golongan nasionalis yang diwakili oleh Ir. Soekarno (*Sartono K, VI. 1977: 11*).

Keikutsertaan K.H. Mas Mansoer dan Ki Hajar Dewantara dalam kepemimpinan POETERA, disebabkan karena K.H. Mas Mansoer mantan ketua Muhammadiyah yang disegani, sedangkan Ki Hajar Dewantara adalah tokoh Pendidikan Taman Siswa. Oleh karena itu, pengaruh mereka sangat besar terhadap masyarakat.

Atas pertimbangan yang matang dan jaminan bahwa POETERA dapat mempersatukan rakyat guna mengabdikan kepada usaha-usaha perang, akhirnya Jepang menyetujui gerakan itu. Pemerintah Jepang mempunyai tujuan agar POETERA dapat memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha-usaha pemerintahan militer Jepang. Hal ini dapat terlihat dari peraturan dasar organisasi tersebut, antara lain :

- a. Memimpin rakyat agar kuat rasa tanggung jawabnya, serta kewajibannya menghapus pengaruh Amerika, Inggris dan Belanda;
- b. Mengambil bagian dalam usaha mempertahankan Asia Raya;
- c. Mendalamkan pengertian persaudaraan Indonesia dan Jepang;
- d. Mengintensifkan pelajaran-pelajaran bahasa Jepang; dan
- e. Mempropagandakan sebagai tersebut di atas.

POETERA disusun atas pimpinan pusat dan pimpinan daerah. Pimpinan daerah dibagi sesuai dengan tingkat daerahnya. Sedangkan pimpinan pusat masing-masing bagian disebut pejabatan, yaitu :

- a. Pejabatan Susunan Pembangunan
- b. Pejabatan Usaha dan Budaya
- c. Pejabatan Propaganda

Usaha Pengembangan POETERA dimulai pada bulan April 1943, dengan diangkatnya pemimpin tertinggi, Ir. Soekarno yang dibantu oleh Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara dan K.H. Mas Mansoer. Disamping itu, diangkat beberapa penasehat bangsa Jepang, yaitu Mijoshi, bekas konsul Jepang di Jakarta, G. Taniguchi, pemimpin Surat Kabar "To Indo Nippon", Ichiro Yamasaki, pemimpin badan perdagangan dan Akiyama dari Yokohama Bank (Asia Raya, 10 Maret 1943). Adanya penasehat bangsa Jepang itu, merupakan pengawasan terhadap para pemimpin POETERA, sehingga membatasi tindak tanduk mereka.

Perkembangan dan aktifitas POETERA telah menunjukkan keberhasilannya dalam mempersiapkan rakyat secara mental bagi kemerdekaan Indonesia dan bukan tujuan yang diinginkan oleh Jepang. Ki Hajar Dewantara dalam bukunya mengatakan: "Para Pemimpin POETERA bersumpah di dalam hatinya masing-masing, bahwa kemerdekaan seratus persenlah yang akan dikejar secara gerilya politik". (*Ki Hajar Dewantara, 1952: 122*).

Keberhasilan POETERA dalam membina rakyat secara luas dicapai dengan cara mengadakan rapat raksasa maupun melalui siaran radio. Dilain pihak, POETERA di tingkat *Syu* dan daerah yang bertingkat lebih rendah tidak dapat berkembang pesat. Penyebab kurang pesatnya POETERA adalah kondisi sosial-ekonomi. Di samping itu, walaupun POETERA sebagai organisasi resmi pemerintah, bantuan dari pemerintah tidak dapat dirasakan. Sehubungan dengan itu, POETERA harus mengerahkan dana iuran anggota serta keuntungan badan-badan perdagangan yang didirikan untuk penghidupannya. Pihak Jepang mulai menyadari bahwa POETERA lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia, sehingga kurang menunjukkan dukungannya kepada pemerintah Jepang. Oleh karena itu, Jepang mulai memikirkan pembentukan organisasi baru yang dapat mencakup semua golongan masyarakat.

Berdasarkan "*Osamu Sirei*" No.44 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 1943 mengenai pembentukan "Pasukan Sukarela" untuk membela Jawa baik oleh *Gunshireikan* maupun *Gunseikan* dijelaskan bahwa pembentukan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) adalah penting. Selain itu, ditekankan bahwa perang Asia Timur Raya adalah perang bagi seluruh Asia dan kemenangan dalam perang merupakan kemenangan bagi orang Asia. Dengan demikian orang Asia diwajibkan untuk ikut dalam usaha mencapai kemenangan akhir.

Proses pembentukan PETA, dimulai dengan usul R. Gatot Mangkoepradja, melalui suratnya yang ditujukan kepada *Gunseikan* pada tanggal 8 September 1943, yang meminta agar bangsa Indonesia

diperkenankan membantu Pemerintah Militer Jepang. Bukan saja di garis belakang tetapi juga di medan perang. Akan tetapi di balik usul itu sebenarnya pemerintah Jepang memperalat R. Gatot Mangkoepradja untuk membuat usul tersebut. Tujuannya adalah agar pembentukan PETA mendapat dukungan rakyat Indonesia yang tergabung dalam PETA. (Nugroho Notosusanto, 1979: 13-14).

Organisasi militer lain yang dibentuk Jepang ialah Keibondan semacam barisan-barisan polisi. Tujuan Jepang mendirikan organisasi militer tersebut, disebabkan oleh karena sejak tahun 1943 situasi perang telah berubah, sikap ofensif Jepang beralih ke sikap defensif. Serangan-serangan Sekutu di daerah Pasifik mulai dirasakan. Untuk menghadapi keadaan gawat itu, Jepang berusaha mengumpulkan dan mendidik kaum muda Indonesia dalam bidang militer secara intensif.

Pada waktu itu golongan pemuda mendapat perhatian juga dan Pemerintah Pendudukan Jepang. Hal ini antara lain, disebabkan golongan ini umumnya memiliki semangat yang tinggi, giat dan biasanya masih diliputi idealisme. Mereka belum sempat dipengaruhi oleh alam pikiran Barat. Dengan demikian maka propaganda dan pihak Jepang diduga akan mudah dapat ditanamkan. Untuk itu, maka salah satu pelajaran yang ditekankan ialah *Seisyin* atau semangat. Semangat yang diutamakan ialah semangat ksatria atau *Busyido* yakni berbakti kepada tuannya atau pemimpinnya dan orang tuanya. Selain itu, ditekankan pula perlunya disiplin dan diberantasnya rendah diri serta semangat budak. Realisasi dari pendapat tersebut, Jepang meresmikan gerakan *Seinendan* atau Barisan Pemuda Indonesia untuk menjadi *Heiho* atau pembantu prajurit Jepang. *Seinendan Dojo* di Tangerang merupakan tempat latihan pemuda yang pertama. Para pemuda tersebut dilatih militer dengan senjata-senjata tiruan yang terbuat dari kayu.

Dalam menghadapi kekuatan Serikat, Jepang berusaha menjadikan seluruh daerah yang didudukinya sebagai rangkaian pertahanan yang kompak dimana seluruh penduduk dengan bahan yang ada di daerahnya dikerahkan. Pengerahan penduduk tidak hanya

terdiri dari penduduk asli, tetapi berlaku untuk semua golongan yang ikut serta dalam usaha melawan Serikat. Demikianlah, pada tanggal 8 Januari 1944 diperkenalkan sistem *Tonarigumi* (Rukun Tetangga), yang dimaksudkan untuk memperketat pengendalian terhadap penduduk (Kan Po, 25 Januari 1944: 19).

Oleh karena perang semakin mendesak Jepang, maka kewajiban yang harus dilakukan *Tonarigumi* menjadi lebih aktif. Kewajiban itu antara lain mengadakan latihan bersama-sama dalam pencegahan bahaya udara, kebakaran, pemberantasan mata-mata musuh dan penyampaian ikhtiar pemerintah militer kepada penduduk serta dianjurkan menambah hasil bumi dan berbakti kepada pemerintah militer dalam bidang lain (*Djawa Baroe*, No. 3 Th. 1944: 7).

Setelah sistem itu berjalan lancar, dibentuk *Djawa Hokokai*. Organisasi yang dilebur ke dalam *Djawa Hokokai* antara lain, *Fujinkai* (Perkumpulan Kaum Wanita), *Masjumi*, *KAKYO SOKAI* (Perhimpunan Cina), *Taikukai* (Perkumpulan Olah Raga), dan *Keimin Bunka Syodosyo* (Himpunan Kebudayaan) (*Asia Raya*, 19 Maret 1944).

*Djawa Hokokai* (Perhimpunan Kebaktian Jawa) didirikan pada tanggal 8 Januari 1944 oleh Panglima Tentara Keenam belas, Jenderal Kumakichi Harada yang sebelumnya telah membubarkan POETERA.

Alasan didirikannya *Djawa Hokokai* karena semakin menghebatnya segenap tenaga rakyat secara lahir bathin. Dasar pengertiannya adalah dari *Hokoseisyin* (Semangat Kebaktian) yang mempunyai tiga dasar, yaitu :

1. Mengorbankan diri;
2. Mempertebal Persaudaraan;
3. Melaksanakan sesuatu dengan bukti.

*Djawa Hokokai* merupakan lembaga yang integral dengan tubuh pemerintahan. Sedangkan tujuannya adalah mempersatukan semua kekuatan Sosio Ekonomi dan kultural, serta kekuatan-kekuatan politik untuk menyelesaikan perang dengan tenaga dan materiil yang ada.

Pengawasan *Djawa Hokokai* langsung dipimpin oleh Gunseikan. Demikian pula *Syukokan* sampai *kuco* adalah pemimpin-pemimpin *Djawa Hokokai* secara *ex officio*. Sedangkan kegiatannya, sebagaimana digariskan dalam peraturan dasarnya meliputi :

- a. Melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga kepada pemerintah Jepang; .
- b. Memimpin rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antara segala bangsa;
- c. Memperkokoh pembelaan tanah air;
- d. Memperteguh kehidupan di masa perang (Peratoeran Kebaktian Rakyat, 1944: 28).

Sekitar akhir tahun 1942 kedudukan pasukan Jepang di Pasifik mulai terdesak karena serangan balas pasukan Sekutu. Untuk menarik dukungan penduduk setempat, maka Jepang merencanakan memberi kemerdekaan kepada Burma dan Philipina yang disampaikan Perdana Menteri Tojo pada akhir Januari 1943. Akan tetapi Perdana Menteri Tojo tidak menyinggung rencana pemberian kemerdekaan kepada Indonesia. Dalam hubungan ini tokoh nasionalis utama, Soekarno dan Hatta mengajukan protes kepada Jepang melalui *Gunseikan* dan mengatakan tidak bertanggung jawab terhadap dukungan bangsa Indonesia untuk peperangan Jepang. Protes tersebut sangat beralasan karena secara sosio kultural dan politik, bangsa Indonesia lebih maju daripada Burma dan Philipina. Akhirnya protes tersebut diteruskan ke Tokyo dan pemerintah Jepang di Tokyo mengirimkan Menteri Kemakmuran Asia Timur Raya, Aoki yang mengunjungi Indonesia pada bulan Mei 1943 dan disusul Perdana Menteri Tojo pada bulan Juli 1943.

Menanggapi protes tokoh nasionalis tersebut, pemerintah Jepang di Tokyo dalam “Konferensi Penghubung” mengambil keputusan untuk menanggukuhkan pemberian kemerdekaan bagi Burma dan Philipina. Sedangkan untuk Indonesia, ditempuh kebijaksanaan partisipasi politik (*Seyi Sanyo*) :

1. Pembentukan Dewan Pertimbangan Pusat (*Chuo Sangi-in*);
2. Pembentukan Dewan Pertimbangan Keresidenan (*Shu Sangikai*);
3. Penunjukan penasehat-penasehat Indonesia di departemen-departemen;
4. Pengangkatan orang-orang Indonesia ke dalam Pemerintah dan organisasi resmi lainnya.

Pemerintah Jepang semula tidak mempunyai rencana memberi kemerdekaan terhadap Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Perdana Menteri Tojo. Hal ini dimungkinkan karena apabila Indonesia diberikan kemerdekaan, maka eksploitasi Jepang di Indonesia akan terganggu. Sedangkan Indonesia merupakan pertahanan kekuatan yang terpenting di Asia Tenggara.

Dari gambaran di atas, tampak sekali bahwa Jepang sangat membutuhkan bantuan rakyat guna kepentingan perangnya, yaitu menahan ofensif sekutu yang semakin dahsyat. Berdasarkan Keputusan sidang Parlemen ke 82 di Tokyo, dikemukakan oleh Perdana Menteri Tojo di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1943. Antara lain menyatakan :

“.....kini Jawa mempunyai kedudukan yang paling penting dalam suasana perang Asia Timur Raya. Oleh sebab itu, usaha seluruh rakyat Jawa memberikan pengaruh yang sangat besar dalam usaha perang ini. Baru-barn ini dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Jepang, saya menyatakan agar tahun ini juga pemerintah di Tokyo memberi kesempatan pada penduduk asli Jawa untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan negeri Jawa selekas mungkin. Berhubung dengan itu, saya berharap kepada sekalian penduduk asli Jawa agar sadar dan insaf akan tujuan dan pendirian Jepang yang sebenarnya,

serta memusatkan dan membulatkan segala tenaga dalam usaha pemerintahan, ekonomi, budaya dan bekerja mati-matian untuk melaksanakan cita-cita pembentukan Jawa Baru" (*Pandji Poestaka*, No. 2027, 1943: 191).

Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 1943, menyusul pengumuman *Saiko Syikikan*, Jenderal Kumakichi Harada yang menggantikan Letnan Jenderal Histoshi Imamura, mengumumkan tentang garis besar rencana pengambilan bagian dalam pemerintah, meliputi badan-badan pertimbangan, baik di pusat maupun di daerah, penasehat-penasehat pada Departemen Pemerintah Pendudukan Militer Jepang dan jabatan tinggi lainnya bagi orang Indonesia.

Sebagai tindak lanjut rencana tersebut, bulan Oktober 1943, Prof. Hoesein Djajadiningrat diangkat menjadi Kepala Departemen Urusan Agama (*Shumubu*). Jabatan tersebut merupakan posisi tinggi pertama di Pusat Pemerintah Militer Jepang yang diduduki orang Indonesia. Sebelumnya pada bulan September 1943 orang Indonesia sebanyak 7 orang, hanya diangkat sebagai penasehat (*Sanyo*). Ketujuh orang itu, adalah Ir. Soekarno pada *Somubu* (Departemen Urusan Umum), Mr. Soewandi dan dr. Abdoel Rasjid pada *Naimubu* (Departemen Urusan Dalam Negeri), Prof. Dr. Mr. Soepomo pada *Shihobu* (Departemen Kehakiman), Mochtar bin Praboe Mangkoenegoro pada *Kotsubu* (Departemen Lalu Lintas), Mr. Moehammad Yamin pada *Sendenbu* (Departemen Propaganda) dan Prawoto Soemodilogo pada *Sangyobu* (Departemen Perekonomian). Sedangkan pada bulan Nopember 1943, Mr. Soetardjo Kartohadikoesoemo diangkat menjadi Syucokan (Kepala Keresidenan) di Jakarta. Orang-orang yang diangkat ini adalah orang-orang yang terkemuka di Jawa (*Kan Po*, 31, 25 Nopember 1943(2603):4).

Partisipasi politik bangsa Indonesia dalam pemerintahan Jepang sebenarnya untuk mempromosikan kerja sama penduduk Jawa yang merupakan kunci penting dalam memperkuat pertahanan di wilayah Asia Tenggara.

Sehubungan dengan tujuan itu, pada tanggal 5 September 1943, *Saiko Syikikan* mengeluarkan "*Osamu Seirei*" No.36 dan 3 tentang pembentukan *Chuo Sangi-in* dan *Shu Sangi Kai*. Pada pasal 1 "*Osamu Seirei*" No.36 disebutkan "Dengan maksud untuk memajukan usaha pemerintah dengan pesat, maka diadakan *Chuo Sangi-in* berada di bawah pengawasan langsung dari *Saiko Syikikan*, dan tentang urusan pemerintahan, *Chuo Sangi-in* memberi jawaban atas pertanyaan *Saiko Syikikan* serta mengajukan usul-usul kepada *Saiko Syikikan* (*Kan Po*, 26 September 1943: 29).

*Chuo Sangi-in* (Dewan Pertimbangan Pusat) bertempat di Jakarta sedangkan *Shu Sangi Kai* (Dewan Pertimbangan Daerah) didirikan di 17 Keresidenan, di Jakarta serta di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Anggota badan tersebut terdiri dari 43 orang, yaitu 23 orang diangkat oleh *Saiko Syikikan*, 18 orang utusan dan tiap Keresidenan dan Kotapraja Jakarta, serta 2 orang utusan dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Berdasarkan "*Osamu Seirei*" No. 36 dan 37 itu, masalah yang dapat dirundingkan harus menyangkut :

1. Pengembangan Pemerintah Militer;
2. Mempertinggi derajat rakyat;
3. Pendidikan dan Penerangan;
4. Industri dan Ekonomi;
5. Kemakmuran dan Bantuan Sosial;
6. Kesehatan.

Akan tetapi, masalah itu hanya diarahkan kepada usaha untuk membantu keperluan Asia Timur Raya. Dengan demikian, sangat bertentangan sekali dengan arti sebenarnya. Bahkan sebaliknya, derajat rakyat, kemakmuran, bantuan sosial maupun kesehatan rakyat Indonesia semakin menurun.

Keterbatasan bertindak dalam *Chuo Sangi-in*, menimbulkan rasa tidak puas dari para nasionalis Indonesia, karena jawaban atau

usulan yang diajukan dewan ini belum tentu diterima oleh pemerintah Militer Jepang. Selain itu, partisipasi politik bangsa Indonesia hanya berlaku di Jawa saja. Keadaan itu dimungkinkan karena sikap penguasa Angkatan Laut mengenai wilayah yang didudukinya lebih konservatif, sehingga wilayah yang didudukinya dianggap akan tetap menjadi milik kemaharajaan Jepang. Oleh karena itu di wilayah Angkatan Laut gerakan nasionalis lebih ditindas (*Shigetada Nishijima, 1963 367- 268*).

Di samping itu, Pemerintah Militer Jepang menerangkan bahwa para anggota dewan harus menyadari tentang tidak adanya tempat dalam dewan itu untuk birokrasi yang tidak perlu dari orang Indonesia yang sombong (*Kan Po, 25 Agustus 1943 (2603) 13*).

Ir. Soekarno berpendapat tentang perbandingan antara *Chuo Sangi-in* dengan *Volksraad* (Dewan yang ada pada jaman kolonial Belanda). Meskipun dalam *Volksraad* ada ketidakberdayaan dalam mengkritik, kenyataannya dapat mengeritik pemerintah dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan semua aspek kolonial. Sedangkan dalam *Chuo Sangi-in* hal tersebut tidak ada (*Kan Po, 25 Agustus 1943 : 13*).

Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua *Chuo Sangi-in* dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1943. Secara resmi diangkat Ir. Soekarno sebagai ketua dan dua wakil ketua, yaitu RM. AA. Koesoemo Oetoyo dan Dr. Boentaran Martoatmodjo. Pelantikan tersebut dilakukan oleh *Zimukyokucho* (Para anggota dan sekretariat) (*Tjahaya, 17 Oktober 1943*).

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa dewan yang dibentuk oleh pemerintah Militer Jepang merupakan organisasi yang efektif dalam upaya mendorong masyarakat Indonesia agar menyadari dan bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka sesuai dengan keinginan Jepang. Hal ini juga dapat terlihat dari kegiatan *Chuo Sangi-in* yang dibatasi oleh pemerintah Militer Jepang. Tindakan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah Militer Jepang takut akan timbul

reaksi yang berlawanan dari rakyat melalui *Chuo Sangi-in*. Untuk itu seluruh persoalan yang akan dibicarakan harus terlebih dahulu diserahkan kepada *Zimukyoku* (sekretariat) secara tertulis.

Pada tanggal 5-6 Nopember 1943 di Tokyo diadakan Konferensi Asia Timur Raya. Dalam konferensi itu dibicarakan masalah hubungan tertutup antara Jepang, Manchukuo, Cina, Filipina, Thailand dan Burma. Ketika itu, Indonesia tidak diundang walaupun dianggap sebagai salah satu anggota Asia Timur Raya. Hal tersebut mengecewakan rakyat Indonesia. Untuk menghilangkan kekecewaan bangsa Indonesia dan untuk menarik simpati bangsa Indonesia, tiga tokoh Indonesia dengan diantar oleh dua orang Jepang diterbangkan ke Tokyo. Mereka adalah Ir. Soekarno, Drs. Hatta dan Ki Bagoes Hadji Hadikoesoemo. Sedangkan kedua orang Jepang itu adalah Mijoshi dan Terada Kuchi.

Ketiga tokoh Indonesia yang diterbangkan ke Tokyo itu merupakan delegasi dari *Chuo Sangi-in*. Mereka tiba di Tokyo pada tanggal 15 Nopember 1943. Seluruh surat kabar di Indonesia menyiarkan kunjungan ini, begitu pula kantor penerangan di Tokyo mengumumkan kunjungan ini, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

“..... Atas nama seluruh penduduk Indonesia, delegasi menyatakan terima kasih atas diberikannya kesempatan untuk kerja sama dalam pemerintah”.

Publikasi ini diakhiri dengan kata-kata sebagai berikut :

“.....Delegasi Indonesia akan melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana keadaan Jepang yang merupakan pusat kegiatan untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Mereka akan mengetahui kekuatan Jepang, karenanya diharapkan delegasi ini memberi bantuan semaksimal mungkin untuk menggugah semangat dari pada penduduk Jawa untuk membantu perang (*MA. Azis, 1955: 217-218*).

Selama kunjungan di Jepang, delegasi *Chuo Sangi-in* diperlakukan secara berlebihan. Di samping itu diperlihatkan pula pabrik-pabrik baja, amunisi, kapal untuk kepentingan perang. Dalam pertemuan mereka dengan Perdana Menteri Tojo, delegasi meminta keterangan mengenai status Indonesia. Selain itu menanyakan tentang perizinan pengibaran Sang Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta mendesak agar Indonesia disatukan di bawah satu pemerintahan. Akan tetapi, permintaan itu ditolak. Tojo tidak dapat memberikan jaminan, kecuali sesudah Jepang menang atas Sekutu (*GS. Kanabele, 1967: 108*).

Pada tanggal 16 Nopember 1943, delegasi *Chuo Sangi-in* diterima oleh Tenno Heika. Atas jasa-jasanya kepada pemerintah militer di Jawa, maka ketiga tokoh itu mendapat penghargaan berupa bintang Ratna Suci kelas dua (*Kun Nito Suiho-Sho*). Drs. Moh. Hatta dan Ki Bagoes Hadji Hadikoesoemo, sebagai anggota *Chuo Sangi-in*, mendapat bintang Ratna Suci kelas tiga (*Kun Santo Zuiho-Sho*). Bintang Ratna Suci ini biasanya diberikan kepada pegawai pemerintah yang telah berjasa, baik pemerintah militer maupun sipil (*Soeara Moeslimin, 1, 1 Desember 1943: 6*).

Di samping golongan nasionalis dan golongan pemuda, golongan Islam pun mendapat perhatian dari Jepang. Oleh karena itu, untuk menarik simpati golongan Islam dilakukan pendekatan kepada para ulama yang mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat Indonesia. Golongan Islam merupakan golongan yang memperoleh perhatian istimewa dari Jepang, sehingga memperoleh lebih banyak kelonggaran dibanding dengan golongan lain. Dalam rangka memberi kelonggaran kepada golongan Islam di Pulau Jawa, pemerintah Militer Jepang masih mengizinkan berdirinya organisasi Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) yang didirikan pada tahun 1937 di Surabaya, foleh K.H. Mas Mansoer dan kawan-kawannya (*Soeara MIAI, th I No. 1, Januari 2603: 7*).

Usaha lain yang dilakukan Jepang untuk mendekati golongan Islam adalah mendatangkan ahli agama Islam dan Jepang yang tergabung dalam *Somubu*. Ahli agama Islam itu diketuai oleh Kolonel Horie, sedangkan anggotanya antara lain: Abdul Muniam Inada, Saido Wakkasa, Abdul Hamid Ono, Muhammad Saleh Suzuki dan Abdul Munir Watanabe. Mereka bertugas setelah *Gunseikan* mengumumkan kebijaksanaan Jepang terhadap Islam pedesaan, dengan tujuan membuat ahli-ahli kitab suci dan guru-guru agama Islam menjadi pemimpin front sipil yang bertugas menjamin keamanan dan kesiagaan, serta menekan kewajiban ulama di masa peperangan. Untuk itu, dilakukan perjalanan keliling Jawa serta mengadakan pertemuan dengan kyai-kyai setempat.

Selain itu pemerintah militer Jepang mengundang para pemuka Islam Indonesia serta menjamunya di Hotel Des Indes. Peristiwa itu merupakan suatu peristiwa yang tidak terimpikan pada waktu pemerintah Kolonial Belanda (*HI Benda, 1980: 167, 287*).

Tujuan Jepang mendekati golongan Islam, karena Jepang menilai golongan Islam pada dasarnya anti Barat sehingga diduga akan lebih mudah dirangkul. Oleh karena itu MIAI, sebagai satu-satunya organisasi gabungan yang mewakili kepentingan umat Islam di Indonesia, diizinkan tetap berdiri oleh pemerintah Militer Jepang. Akan tetapi setelah diubah anggaran dasar, azas dan tujuannya, isi dari azas dan tujuan MIAI itu antara lain disebutkan turut bekerja dengan sekuat tenaga dalam pekerjaan membangun masyarakat baru, untuk mencapai kemakmuran di lingkungan Asia Timur Raya di bawah pimpinan *Dai Nippon*" (*Asia Raya, 19, 21 Januari 1943*).

Oleh karena MIAI dinilai oleh Jepang kurang memuaskan, maka pada bulan Oktober 1943, MIAI dibubarkan dan diganti dengan Majelis Sjoero Moeslimin (Masjoemi) yang disahkan oleh *Gunseikan* pada tanggal 22 Nopember 1943. Masjoemi diketuai oleh KH. Mas Mansoer, KH. Faridd Ma'ruf, KH. Mukti, KH. Hasjim, Kartosudarmo, Nachrowi, Zainal Aripin dan KH. Muchtar (*Asia Raya, 28 Nopember 1943*).

Selain itu, para pemuka Agama Islam diberikan kesempatan untuk menjadi Bupati atau Kepala Daerah, bahkan panji-panji PETA dilukiskan dengan lambang Islam, di atas lambang "Matahari Terbit". Akan tetapi pengaruh Jepang yang diterapkan pada golongan Islam banyak yang berlawanan dengan prinsip-prinsip agama. Selain itu akibat yang ditimbulkan adalah terjadi pemberontakan-pemberontakan yang dipimpin golongan ulama, seperti terjadi di Singapura (Tasikmalaya) dan di Aceh.

Sebenarnya usaha Jepang itu gagal karena semua organisasi yang didirikan kurang menunjukkan dukungan kepada pemerintah Jepang. Namun sebaliknya, aktifitas organisasi yang didirikan Jepang tersebut telah mempersiapkan rakyat secara mental bagi kemerdekaan.

### **B. Janji Kemerdekaan Indonesia di kemudian Hari**

Pada awal tahun 1944 timbul perkembangan baru dalam politik pemerintah Militer Jepang di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya dua dokumen oleh Hayashi Kyujiro, selaku pejabat tinggi sipil pada Tentara Keenam belas. Dua dokumen tersebut berjudul "Hal-hal mengenai kemerdekaan Jawa dan wilayah lain". Dengan demikian, tampak bahwa gagasan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sudah ada persetujuan. Sedangkan yang menjadi masalah adalah wilayah kekuasaan negara Indonesia yang akan diberikan kemerdekaan. Menurut Hayashi Kyujiro, wilayah itu dibatasi hanya pada Jawa, Madura dan Bali. Sedangkan wilayah lain, untuk sementara dianggap sebagai wilayah kekaisaran Jepang yang akan ditinjau kembali setelah perang selesai (*Hi Benda, et-al, 1965 : 240-248*).

Timbulnya dokumen tersebut, dimungkinkan karena situasi Perang Pasifik tidak terlalu menguntungkan pihak Jepang. Sekitar pertengahan tahun 1944 di medan pertempuran, banyak tentara Jepang terdesak. Berturut-turut Kepulauan Saipan, Irian Timur, Kepulauan Solomon dan Marshall jatuh ke tangan tentara Serikat.

Dengan demikian seluruh garis pertahanan di Pasifik terancam yang berarti kekalahan Jepang telah di ambang pintu. Terbukti bahwa moral masyarakat mulai mundur. Produksi perang merosot yang mengakibatkan kurangnya persediaan senjata dan amunisi. Di samping itu timbul soal-soal logistik karena hilangnya sejumlah kapal laut dan kapal perang (*Brugmans, 1960: 65*).

Sehubungan dengan keadaan itu, *Romusha* (Tenaga kerja) yang telah dipropagandakan Jepang sejak tahun 1943 sebagai "Prajurit Pekerja" atau "Prajurit Ekonomi", lebih digiatkan lagi. Hal ini disebabkan, mereka dibutuhkan sebagai tenaga kasar untuk membuat sarana pertahanan, benteng, jalan raya dan sebagainya. *Romusha* digambarkan sebagai orang yang menunaikan tugas suci untuk angkatan perang Jepang, tetapi kenyataannya mereka hanyalah sebagai budak. Untuk mendapat dukungan rakyat, pada bulan September 1944 *Romusha* sebanyak 500 orang yang terdiri dari pegawai tinggi dan menengah di bawah pimpinan Ir. Soekarno, bekerja selama seminggu di suatu tempat yang penting. Pekerjaan selama seminggu itu disebut "Pekan Perjuangan Mati-matian" (*Djawa Baroe, 1 Oktober 1944: 16-17*). Menurut WF. Wertheim, *Romusha* banyak dikirim ke luar negeri, misalnya Burma, Muangthai, Vietnam dan Malaya. Sedangkan perlakuan pemerintah militer Jepang sangat buruk, kesehatan tidak terjamin dan makanan tidak cukup, sehingga banyak yang meninggal.

Disamping itu, 300.000 *Romusha* yang dikirim ke luar Jawa diperkirakan 70.000 diantaranya dalam kondisi yang menyedihkan (*WE Wertheim, 1959: 316*).

Faktor yang tidak menguntungkan tersebut menyebabkan jatuhnya Kabinet Tojo pada tanggal 17 Juli 1944. Sebagai penggantinya Jenderal Kuniaki Koiso tampil sebagai Perdana Menteri.

Pada bulan Agustus 1944, Kementerian Asia Timur Raya, menyatakan secara jelas bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan yang wilayahnya adalah seluruh wilayah bekas Hindia Belanda.

Selain itu terdapat pula beberapa usulan mengenai “Kemerdekaan Indonesia”, yaitu:

1. “Hal-hal mengenai kemerdekaan Jawa dan wilayah-wilayah lain”, usul dari Kementerian Asia Timur Raya, tanggal 25 Agustus 1944.
2. “Hal-hal mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang kemerdekaan Hindia Timur”, usul dari Kementerian Angkatan Darat, tanggal 26 Agustus 1944.
3. “Hal-hal mengenai kebijaksanaan tentang kemerdekaan Hindia Timur: laporan sementara”, usul dari Kementerian Luar Negeri, tanggal 28 Agustus 1944.
4. “Hal-hal mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang kemerdekaan Hindia Timur”, usul kedua dari kantor pemerintahan wilayah selatan, Kementerian Angkatan Darat, tanggal 29 Agustus 1944.

Persoalan terakhir yang ditekankan dalam usulan tersebut adalah perlunya dibentuk suatu panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia (Hi Bendaet - al, 1965: 249-256). Politik Jenderal Kunaiki Koiso ialah memperhebat usaha mencari “Tetuan Setia” di Asia. Pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang “*Dai Nippon Teikoku Gikai*” atau Dewan Perwakilan Rakyat Jepang, ia mengatakan bahwa “Hindia Timur” akan dimerdekakan di kemudian hari. Pernyataannya adalah sebagai berikut :

“.....tahun lalu, sesuai dengan keinginan kaum pribumi, kemaharajaan telah mengambil langkah-langkah yang menyangkut partisipasi politiknya dan kaum pribumi pun telah mengerti maksud sesungguhnya dari kemaharajaan dan secara tetap melanjutkan perjuangannya mencapai klimaks dari perang Asia Timur Raya. Menanggapi hal ini dan untuk kemakmuran Hindia Timur, bersama ini kekaisaran menyatakan bahwa kemerdekaan akan dikukuhkan di kemudian hari” (HJ. Benda, et-al, 1965: 259).

Akan tetapi dalam dokumen yang dikeluarkan oleh dewan bimbingan perang tertinggi, yaitu motivasi pemberian kemerdekaan Indonesia dinyatakan dengan jelas: “Untuk membantu penyelesaian dengan berhasilnya perang Asia Timur Raya, kekaisaran menyetujui kemerdekaan bagi Hindia Timur”. Adapun mengenai kemerdekaan itu akan diberikan secara bertahap atau keseluruhan, tetap belum dipecahkan. Untuk tujuan itu maka perlu dibentuk sebuah panitia persiapan kemerdekaan yang tugasnya menyelenggarakan persiapan terhadap hal-hal yang perlu untuk melaksanakan kemerdekaan.

Pada waktu itu secara resmi, Pemerintah Jepang belum mempergunakan istilah Indonesia, tetapi Hindia Timur sebagai terjemahan dari “To Indo”. Dan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tergantung kepada tercapainya kemenangan akhir di pihak Jepang. Terlepas dari penjelasan tadi, janji kemerdekaan disambut oleh bangsa Indonesia dengan gembira. Karena hal itu dianggap pembuka pintu bagi tercapainya cita-cita kemerdekaan. Lagu Indonesia Raya berkumandang di mana-mana, Sang Merah Putih dikibarkan di samping bendera Hinomaru.

Janji Jepang mengenai kemerdekaan Indonesia di kemudian hari yang tidak menyebutkan kapan waktunya itu, ditambah dengan penjelasan tambahan bahwa kemerdekaan itu baru diberikan bila perang berakhir dengan kemenangan Jepang. Hal tersebut menunjukkan siasat Jepang untuk menarik perhatian bangsa Indonesia supaya lebih bersimpati kepada Jepang. Sementara itu pada tanggal 1 Maret 1945, *Saiko Syikikan* mengumumkan pembentukan “*Dokuritsu Zyumbi Tyosakai*” yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Tujuan politik dan pembentukan badan tersebut ialah agar rakyat Indonesia tetap memberikan dukungan kepada Jepang, sekalipun kedudukan militer Jepang di front Pasifik sudah goyah.

Tugas BPUPKI ialah mempelajari soal-soal yang berhubungan dengan segi pemerintahan, ekonomi dan tata pemerintahan yang

diperlukan dalam usaha pembentukan Indonesia kelak kemudian hari. Badan tersebut diresmikan tanggal 28 Mei 1945, yang diselenggarakan di bekas gedung *Volksraad* (Gedung Pancasila, sekarang ini) dengan dihadiri oleh Jenderal Itakagi dan Letnan Jenderal Nagano. Dalam upacara tersebut diadakan suatu upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih yang dilakukan oleh Toyohiko Masuda dan pengibaran bendera Jepang oleh AG. Pringgodigdo.

Dalam upacara pelantikan anggota BPUPKI itu, dibacakan amanat dari Saiko Syikikan, isinya yaitu : (*Lembaga Soekarno Hatta, 1984 : 28-29*).

*“Kemerdekaan Indonesia adalah suatu bukti yang nyata tentang tujuan perang suci sekarang ini, yang timbul memang berdasarkan cita-cita yang gemilang dan diciptakan sejak berdirinya negara “Dai Nippon”. Akan tetapi, usaha untuk mendirikan negara merdeka yang Baru bukanlah usaha mudah. Lebih lagi jika tidak dengan jalan mempelajari; menyelidiki dan merencanakan dengan seksama dan teliti, segala usaha untuk menegakkan kekuatan pembelaan, dan soal-soal yang menjadi dasar negara. Maka sudah barang tentu, bahwa pekerjaan mulia dalam pembentukan “Negara Merdeka” di kemudian hari, atau akan mempunyai pokok dasar yang kokoh dan teguh. Pada kali ini, bertempat di ruangan ini, mulai dilakukan langkah pertama dalam pekerjaan “Dokuritsu Zyumbi Tyosakai”. Untuk menyelidiki serta melaksanakan dasar usaha itu dengan sedalam-dalamnya dan seteliti-telitinya. Berhubung dengan itu, maka saya mempunyai penghargaan besar pada badan ini dan tuan-tuan “Qiin” hendaklah menginsafkan dalam hati sanubari tuan-tuan, betapa pentingnya dan besarnya kewajiban tuan-tuan untuk menyelesaikan usaha yang mulia itu, sehingga tercatatlah peristiwa yang cemerlang ini dalam riwayat pembentukan negara “Indonesia Merdeka”.*

Jakarta, tanggal 28 bulan 5

Tahun Syoowa, 20 (2605)

Saiko Syikikan.

Anggota BPUPKI terdiri dari 62 orang bangsa Indonesia termasuk 4 orang dari golongan keturunan Cina, Arab, dan Belanda ditambah 7 orang istimewa bangsa Jepang. Badan ini diketuai oleh Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat dibantu dua wakil ketua yaitu seorang Jepang bernama Yoshido Ichibangase dan R.P. Soeroso.

Sidang pertama BPUPKI dimulai tanggal 29 Mei 1945 dan berakhir pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini telah berhasil mencetuskan Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila. Selain itu, pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno selaku anggota BPUPKI seperti yang dirumuskan Jepang dengan menyatakan bahwa “Kalau benar semua ini harus diselesaikan lebih dahulu, sampai *njlimet*, maka saya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, tuan tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, kita semua tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, sampai di lubang kubur”.

Menanggapi pidato 1 Juni 1945, Yoshido Ichibangase, dalam laporannya yang disimpan dalam salah satu arsip resmi di Amsterdam, menulis bahwa “Mayoritas kaum nasional menuntut kemerdekaan sekarang, sekalipun persiapan belum sempurna. Kata Ir. Soekarno kemerdekaan ialah ibarat jembatan, setelah itu kita sempurnakan masyarakat kita. Saya mendapat kesan, bahwa Ir. Soekarno akan memutuskan hubungan dengan Jepang apabila Jepang tidak segera memberikan kemerdekaan pada Indonesia” (*Departemen Luar Negeri: 1980 : 30*).

Dalam sidang kedua yang diadakan dari tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945 telah menghasilkan Hukum Dasar atau Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka. Di samping itu telah berhasil memecahkan masalah sehingga tercapai suatu persetujuan dalam Naskah Rancangan Pembukaan Hukum Dasar (kelak terkenal dengan sebutan “Piagam Jakarta”), terumuskannya Naskah pernyataan Indonesia Merdeka, Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar termasuk di dalamnya dasar negara serta naskah UUD, maka tugas BPUPKI dianggap telah selesai.

Sementara itu pada tanggal 16 Juli 1945, Kepala Staf Tentara Umum Selatan, juga tentara keenam belas dan tentara kedua puluh lima diberi instruksi dari Tokyo mengenai keputusan Dewan Perang Tertinggi tentang kemerdekaan Indonesia. Instruksi tersebut, yaitu agar penguasa militer di Indonesia mempercepat persiapan kemerdekaan. Selain itu, Jenderal Terauchi pada tanggal 2 Agustus 1945 mengirim telegram kepada Menteri Muda Angkatan Darat dan tembusannya kepada "Oka" (kode bagi tentara Garnisun di Kalimantan), "Tomi" (Tentara Kedua puluh lima di Sumatera) dan kepada Armada Ekspedisi Selatan Kedua. Isi telegram itu adalah sebagai berikut

1. Harus dikeluarkan pengumuman (Pada awal bulan Agustus boleh jadi pada tengah hari tanggal 7 Agustus) yang berisi: Panitia Persiapan Kemerdekaan untuk Hindia Timur akan didirikan, sedangkan pada pertengahan Agustus pembentukan Panitia itu harus dilaksanakan.
2. Tanggal kemerdekaan direncanakan pada awal September (7 September). Tetapi pengumuman mengenai waktu yang setepatnya akan dikeluarkan pada saat yang langsung menjelang kemerdekaan.

Selanjutnya dalam telegram itu, Terauchi mengatakan bahwa "Untuk waktu sekarang kekaisaran akan memberi bimbingan yang positif untuk kemerdekaan pihak ketiga" (*HI Benda, et-al, 1965 : 275-279*).

Akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sesuai dengan telegram Jenderal Terauchi tersebut. PPKI beranggotakan 21 orang yang terdiri dari beberapa tokoh pergerakan dan suku di Indonesia. Sebagai ketuanya ditunjuk Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta wakil ketua. Untuk pengangkatan itu, Jenderal Terauchi memanggil Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan K.R.T Radjiman Wedyodiningrat menghadap kepadanya. Pada tanggal 9 Agustus 1945 ketiga tokoh Indonesia itu berangkat menuju markas besar Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam

Selatan. Perjalanan mereka ke Dalat disertai Pejabat *Gunseikanbu*, yaitu Kolonel Nomura dan Mijoshi.

Dalam suatu pertemuan Jenderal Terauchi menyatakan bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk melaksanakannya, telah dibentuk PPKI dan pelaksanaannya terserah kepada saudara-saudara sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Perkataan itu ditujukan kepada Ir. Soekarno dan Drs. Hatta. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, sekalipun pelaksanaannya mungkin tidak dapat sekaligus, melainkan bagian demi bagian sesuai dengan kondisi setempat (*Moh. Hatta; 1983: 18-19*).

Perubahan politik Jepang mengenai kemerdekaan Indonesia dimungkinkan karena Sekutu telah mengeluarkan "Deklarasi Postdam" pada tanggal 26 Juli 1945 yang memberikan pilihan kepada Jepang, yaitu:

"Kami memerintahkan kepada pemerintah Jepang untuk mengumumkan penyerahan tidak bersyarat kepada semua angkatan perangnya, dan menjalankan perintah-perintah, patch dalam segala tindakan. Penolakan terhadap perintah ini, berarti mengakibatkan kehancuran total bagi Jepang" (*Achmad Soebardjo, 1978 :293-294*).

Selain itu Jepang pun menghadapi Rusia dengan menyatakan perang terbuka yaitu dengan cara melakukan penyerbuan ke Manchuria. Keadaan itu ditambah lagi dengan jatuhnya bom atom Amerika di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Sedangkan pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom Amerika dijatuhkan di Nagasaki yang mengakibatkan kehancuran kota dan merenggut ribuan jiwa manusia. Dengan demikian, dapat diduga bahwa kekalahan Jepang akan terjadi dalam waktu yang singkat, sehingga proklamasi Indonesia harus segera dilaksanakan.

Pada tanggal 13 Agustus 1945 rombongan Soekarno meninggalkan Dalat, menuju Jakarta. Akan tetapi sebelumnya singgah di Singapura. Mereka bertemu dengan anggota PPKI dari Sumatera, yaitu MR. Teukoe Moehammad Hasan, Dr. Amir dan Mr. Abbas. Dalam pertemuan ini, mereka bertukar pikiran mengenai perkembangan akhir peperangan Jepang.

Pada tanggal 14 Agustus 1945, ketiga tokoh Indonesia itu tiba kembali di Jakarta. Ir. Soekarno mengumumkan di depan orang banyak yang menjemputnya, bahwa "Kalau dulu saya berkata sebelum jagung berbuah, Indonesia akan merdeka, sekarang saya dapat memastikan Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga". Pertimbangannya ialah bahwa PPKI akan segera dapat menyelesaikan soal-soal yang perlu untuk kemerdekaan, terutama UUD yang rancangannya sudah ada sebagai hasil rancangan BPUPKI.

Sekitar pukul 14.00 ketika Hatta tiba di rumah, Sutan Sjahrir telah menunggu. Maksud kedatangan Sutan Sjahrir yaitu menyampaikan berita kekalahan Jepang yang didengarnya dari siaran radio luar negeri. Drs. Hatta sempat kaget dan mengatakan bahwa kemerdekaan semata-mata di tangan kita, hanya penyelenggaraannya diserahkan kepada PPKI. Hal ini sesuai dengan ucapan Jenderal Terauchi di Dalath.

Sutan Sjahrir berpendapat, apabila pernyataan kemerdekaan dilakukan oleh PPKI, maka Sekutu akan menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia adalah buatan Jepang. Untuk itu disarankan agar Ir. Soekarno sendiri yang menyatakan kemerdekaan Indonesia atas nama Pemimpin rakyat, dengan perantaraan corong radio. Drs. Moh. Hatta sependapat dengan Sutan Sjahrir mengenai proklamasi kemerdekaan selekas-lekasnya. Akan tetapi tidak yakin bahwa Soekarno mau mengambil langkah bertindak sendiri mengumumkan proklamasi.

Setelah pembicaraan itu, Drs. Moh. Hatta dan Sutan Sjahrir menuju rumah Ir. Soekarno. Pembicaraan mengenai kemerdekaan Indonesia tentang kekalahan Jepang, diungkapkan Sutan Sjahrir kepada

Ir. Soekarno. Akan tetapi seperti yang dipikirkan Drs. Moh. Hatta, bahwa Ir. Soekarno tidak bersedia menyatakan proklamasi Indonesia sendiri, beliau mengatakan "Saya tidak berhak bertindak sendiri, hak itu adalah hak dan tugas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang saya menjadi ketuanya. Alangkah janggalnya di mata orang, setelah kesempatan terbuka untuk mengucapkan Kemerdekaan Indonesia, saya bertindak sendiri melewati Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang saya ketuai" (*Moh. Hatta, 1982:436442*).

Pada waktu itu, Ir. Soekarno tidak mengetahui bahwa justru pada saat-saat itu malapetaka telah menimpa Jepang. Hiroshima dan Nagasaki mengalami pemboman, bom atom dari pihak Sekutu. Dengan demikian maka sampailah puncak kegentingan perang Asia Timur Raya yang dibangga-banggakan Jepang sebagai "Perang Sucinya" itu pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal itu pula yang menyebabkan Kaisar Hirohito terpaksa memerintahkan kepada seluruh tentaranya untuk menyerah tanpa syarat. Namun berita ini rupanya untuk daerah pendudukan Jepang sengaja diperlambat penyiarannya. Sehingga pada waktu itu kota Jakarta diliputi oleh suasana tanda tanya, desas-desus menyerahnya Jepang hanya tersebar dari mulut ke mulut.

Nyatanya pada saat itu di Indonesia terjadi kekosongan pemerintahan. Jepang sudah jatuh, sedangkan Sekutu belum tiba. Beruntunglah bahwa kesempatan "*Vacuum of Power*" itu dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamkan kemerdekaan Indonesia.

### **C. Peranan Golongan Pemuda dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.**

Adanya perhatian pemerintah pendudukan Jepang terhadap pemuda Indonesia merupakan kesempatan baik bagi golongan pemuda untuk turut serta mempersiapkan diri berjuang menuju kemerdekaan. Hal ini dikarenakan Gerakan Tiga A yang dibentuk Jepang untuk

kepentingannya, ternyata mempunyai tujuan bahwa bangsa Indonesia ingin mengusir penjajah.

Golongan pemuda dalam Gerakan Tiga A, dihimpun pada "Barisan Pemuda Asia Raya". Sedangkan pemuda-pemuda di pedesaan mendirikan badan yang dinamakan *Keibodan*.

Ketika pada tanggal 3 Oktober 1943 didirikan PETA, maka berbondong-bondonglah pemuda Indonesia mendaftarkan diri kedalamnya. Menjadi anggota PETA merupakan suatu kebanggaan dan mereka memang merasa menjadi pembela tanah air dan bangsa. Sehingga tidak mengherankan bila kemudian terjadi pemberontakan terhadap Jepang yang kala itu menjadi penguasa.

Sikap Jepang yang rakus guna menunjang keperluan perang tanpa memperhitungkan penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh tindakannya itu, menimbulkan kemarahan tentara PETA di Blitar. Pada tanggal 14 Februari 1945 meletuslah perlawanan tentara PETA Blitar kepada Jepang. Pimpinan terkenal dari tentara PETA Blitar itu ialah Supriadi. Tujuan perlawanan itu tampak dari kata-kata Supriadi sebagai berikut: "Jangan sampai negeri kita didominionkan, jangan sampai kemerdekaan itu dihadiahkan, tetapi harus kita rebut sendiri dengan kekuatan senjata" (*Nugroho N, 1969 : 28*).

Pada hakekatnya, segenap barisan pemuda itu disiapkan untuk menyongsong kemerdekaan Indonesia dan sama sekali tidak untuk memenuhi kehendak dan niatan pihak Jepang untuk membantu perangnya melawan Sekutu.

Di samping kegiatan pemuda yang tampak nyata di depan umum, terdapat juga kelompok pemuda yang bekerja secara diam-diam atau secara ilegal. Salah satunya adalah asrama Angkatan Baru Indonesia, di Menteng 31 (Sekarang Gedung Juang 45) yang dipimpin oleh Sukarni dan Chairul Saleh. Beberapa pimpinan Indonesia seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Amir Sjarifuddin, Moh. Yamin, Mr. Subardjo dan lain-lain memberikan kursus politik di asrama tersebut.

Rasa kebangsaan tambah tertanam dalam dada para pemuda dan setelah Jepang memberikan janji-janji barunya tentang kemerdekaan Indonesia, di Bandung berhimpunlah sejumlah pemuda yang dengan tegas menghendaki Indonesia merdeka sekarang juga. Pertemuan yang diadakan tanggal 16 Mei 1945 di Villa Isola, Bandung (sekarang Kampus UPI), antara lain membahas tentang bentuk negara Indonesia yang akan merdeka nanti, yaitu republik berdasarkan kedaulatan rakyat dan untuk seluruh kepulauan Indonesia. Diantara pemuda yang hadir dalam pembicaraan itu ialah SK Trimurti, Chairul Saleh, Pandu Kartawiguna, Adam Malik, BM. Diah, Soekarni dan lain-lain. Penyelenggaraan pertemuan itu diprakarsai oleh Angkatan Moeda Indonesia. Adapun Angkatan Moeda Indonesia, dimungkinkan dibentuk atas inisiatif Jepang pada pertengahan tahun 1944. Akan tetapi lama kelamaan organisasi pemuda itu menjadi suatu gerakan pemuda yang anti Jepang.

Pertemuan itu berada dalam suasana militan dan nasionalistis. Sehingga lagu yang dinyanyikan hanya Indonesia Raya dan bendera yang dikibarkan hanya bendera Merah Putih. Setelah tiga hari lamanya kongres, dicapai dua resolusi, yaitu : (Asia Raya, 24 Mei 1945)

1. Semua golongan Indonesia; terutama golongan pemuda dipersatukan dan dibulatkan di bawah satu pimpinan nasional.
2. Dipercepatnya pelaksanaan kemerdekaan Indonesia.

Akan tetapi resolusi itu tidak memuaskan beberapa tokoh pemuda yang terutama utusan dari Jakarta, mereka bertekad untuk tidak mengambil bagian dalam gerakan Angkatan Moeda Indonesia. Untuk itu mereka bermaksud menyiapkan suatu gerakan pemuda yang lebih radikal.

Untuk itu pada tanggal 3 Juni 1945 di Jakarta diadakan pertemuan para pemuda secara rahasia bertempat di gedung *Djawa Hokokai* cabang kota Jakarta, di Gambir Selatan (sekarang jalan Merdeka Selatan). Pertemuan tersebut dihadiri oleh sekitar 100 orang